

## Format Debat Parlemen Inggris untuk Mengenalkan Isu Kontemporer: Studi Kasus Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 2021

Satriya Bayu Aji<sup>a,1\*</sup>

<sup>a</sup> Politeknik Negeri Batam, Indonesia

<sup>1</sup> satriya@polibatam.ac.id\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 20 Maret 2022;

Revised: 12 April 2022;

Accepted: 22 April 2022.

### Kata-kata kunci:

Format Debat;

Kompetisi Debat;

Isu Kontemporer.

---

### ABSTRAK

Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) mengadopsi sistem Parlemen Inggris sejak tahun 2021. Artikel ini mengkaji mosi sebagai komunitas Asia, Dewan ini tidak akan mendukung gerakan pro minoritas lainnya seperti Black Lives Matter, gerakan Feminist, gerakan Chicano/Latino yang diangkat pada babak perempat final KDMI 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis debat di dua ruang yang berbeda, yang berlangsung pada babak perempat final KDMI 2021. Argumen yang digunakan akan dibandingkan dengan temuan dalam artikel terkait. Data berasal dari transkrip video perempat final KDMI 2021. Model Toulmin digunakan dalam analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiap ruang mempunyai variasi isu yang diangkat, namun terdapat tiga isu yang memiliki kemiripan. Berdasarkan data yang diperoleh, model juri sebagai warga yang sadar akan hak pilihnya tidak serta merta menghilangkan subjektivitas dalam penilaian. Dengan membandingkan argumen dalam debat dengan konsep terkait dalam penelitian sebelumnya, sulit menentukan apa saja yang harus diketahui dan tidak diketahui seorang juri.

---

### Keywords:

Debate Format;

Debate Competition;

Contemporary Issues.

---

### ABSTRACT

*British Parliamentary Debate to Introduce Contemporary Issues: A Case Study of the Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 2021 KDMI.* Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia has adopted the British Parliamentary system since 2021. This article highlights the motion sebagai komunitas Asia, Dewan ini tidak akan mendukung gerakan pro minoritas lainnya seperti Black Lives Matter, gerakan Feminist, gerakan Chicano/Latino. The motion was in the quarterfinals of the 2021 KDMI. This study aimed to analyze the debate in two different rooms, taking place in the quarterfinals of the 2021 KDMI. The arguments brought up in the round were compared with the findings in the related articles. The data was obtained from the video transcript of the 2021 KDMI quarterfinals. The Toulmin model was used in data analysis. The results show that each room has a variety of issues raised, but there are three issues that have similarities. Based on the data obtained, the ordinary intelligent voter model does not necessarily eliminate subjectivity during the adjudication. By comparing arguments in the debates with related concepts in the previous studies, it is argued that determining what a jury should and not know is impossible.

---

Copyright © 2022 (Satriya Bayu Aji). All Right Reserved

How to Cite : Aji, S. B. (2022). Format Debat Parlemen Inggris untuk Mengenalkan Isu Kontemporer: Studi Kasus Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia 2021. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 2(2), 54–64. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v2i2.899>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) merupakan turnamen debat yang rutin dilaksanakan tiap tahun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 dilaksanakan secara daring. Kemudian, pada tahun 2021 (dan kini di 2022), terdapat perubahan format debat melalui adopsi sistem debat parlemen Inggris (British Parliamentary), sama seperti yang digunakan dalam National University Debating Championship (NUDC). Perubahan ini memerlukan pendekatan berbeda dari tim-tim yang berlaga.

Salah satu perbedaan yang jelas terlihat adalah perubahan jumlah anggota di tiap tim, dari tiga peserta menjadi dua peserta. Jumlah tim yang berlaga di tiap ronde pun berbeda, yang sebelumnya dua tim menjadi empat tim. Selain dibagi berdasarkan kubu (tim Pemerintah dan tim Oposisi), tim dibagi berdasarkan paruh (tim Pembuka dan tim Penutup). Berdasarkan dua kategori ini, keempat tim yang berlaga terdiri dari tim Pemerintah Pembuka, tim Oposisi Pembuka, tim Pemerintah Penutup, dan tim Oposisi Penutup. Perubahan juga ada pada urutan giliran berbicara tiap peserta. Tiap peserta mempunyai peran yang berbeda sesuai posisi peserta dalam tim. Pembicara pertama dari tim Pemerintah Pembuka disebut sebagai Perdana Menteri. Pembicara kedua dari tim Pemerintah Pembuka disebut sebagai Wakil/Deputi Perdana Menteri. Pembicara pertama dari tim Oposisi Pembuka disebut sebagai Pemimpin Oposisi. Pembicara kedua dari tim Oposisi Pembuka disebut sebagai Wakil/Deputi Pemimpin Oposisi.

Pembicara pertama dari tim Pemerintah Penutup disebut sebagai Anggota Tim Pemerintah. Pembicara kedua dari tim Pemerintah Penutup disebut sebagai Pembicara Penutup Tim Pemerintah. Pembicara pertama dari tim Oposisi Penutup disebut sebagai Anggota Tim Oposisi. Pembicara kedua dari tim Oposisi Penutup disebut sebagai Pembicara Penutup Tim Oposisi. Peserta debat dari tiap kubu memperoleh giliran berbicara secara bergantian, dimulai dari kubu pemerintah. Perdana Menteri memulai perdebatan kemudian disusul Pemimpin Oposisi, Wakil/Deputi Perdana Menteri, Wakil/Deputi Pemimpin Oposisi, Anggota Tim Pemerintah, Anggota Tim Oposisi, Pembicara Penutup Tim Pemerintah, dan Pembicara Penutup Tim Oposisi.

Di format debat Parlemen Inggris, tiap peserta debat hanya memiliki satu kali giliran berbicara (di luar kesempatan untuk menyampaikan sanggahan). Perdana Menteri bertugas menyampaikan detail definisi seluruh istilah yang dianggap relevan dengan mosi yang diperdebatkan. Pada mosi yang memperdebatkan suatu kebijakan (akan dibahas di paragraf berikutnya), hanya Pemimpin Oposisi yang dapat mengajukan usulan tandingan sehingga perdebatan akan berlangsung seputar dua usulan yang disampaikan kedua kubu, bukan antara usul dari Perdana Menteri dengan kebijakan yang tengah berlaku. Wakil/Deputi Perdana Menteri bertugas menambahkan materi baru ke dalam debat dan menulis ulang hal yang disampaikan Perdana Menteri. Wakil/Deputi Pemimpin Oposisi bertugas menambahkan materi baru ke dalam debat dan menulis ulang hal yang disampaikan Pemimpin Oposisi. Anggota Tim Pemerintah dan Anggota Tim Oposisi bertugas memperluas cakupan debat, antara lain dengan menyampaikan bantahan, contoh, analisis, kriteria, dan argumen lain, atau menggunakan ulang argumentasi yang telah muncul sebelumnya pada paruh awal debat sebagai tanggapan terhadap argumen baru yang disampaikan kubu lawan. Pembicara Penutup Tim Pemerintah dan Pembicara Penutup Tim Oposisi menghimpun isu-isu utama dan memilih argumen-argumen yang tengah beredar dalam debat yang menguntungkan masing-masing tim. Keduanya tidak boleh menambahkan argumen baru ke dalam kasus yang disampaikan.

Ada tiga hal yang menjadi tolok ukur tim dalam suatu perdebatan: seberapa jauh mereka dapat meyakinkan dewan juri, seberapa relevan argumen yang disampaikan terhadap beban pembuktian yang ditanggung, dan adakah aturan dalam format debat Parlemen Inggris yang dilanggar. Yang jelas, seluruh tim akan dinilai oleh dewan juri, dengan jumlah dan komposisi yang bisa jadi berbeda-beda di tiap ronde. Idealnya, juri dilarang memberikan penilaian yang subjektif. Untuk itu para juri harus menempatkan dirinya sebagai *warga yang sadar akan hak pilihnya*, yang harus mempunyai ciri-ciri

berikut (World Universities Debating Council, 2022): (1) memiliki pengetahuan mengenai fakta-fakta umum; (2) mengetahui masalah dan peristiwa yang pernah menjadi berita utama internasional dalam jangka waktu yang lama; (3) tidak mendasarkan penilaian pada pengetahuan yang dimiliki, kecuali jika pengetahuan ini sesuai dengan kedua kriteria sebelumnya; (4) tidak terbawa emosi atau pendapat ahli dengan mudah, kecuali ada kaitan rasional dengan argumen yang disampaikan; (5) tidak mendasarkan penilaian pada latar belakang geografis, budaya, nasional, etnis atau latar belakang lainnya; (6) tidak mendasarkan penilaian pada argumen atau gaya berbicara tertentu yang disukai; (7) tidak mendasarkan penilaian kebijakan, solusi, atau masalah berdasarkan perspektif pribadi.

Namun, jelas bahwa penilaian yang objektif akan sangat sulit (atau bahkan mustahil) diberikan. Pertama, tiap juri memiliki pengetahuan, konsep, asumsi, sudut pandang, dan nilainya masing-masing. Para juri juga tidak memiliki kesepakatan mengenai apa saja pengetahuan yang boleh digunakan dalam penilaian (butir 1 dan 2 mengenai ciri *warga yang sadar akan hak pilihnya*). Meskipun tiap juri berperan sebagai orang yang memiliki hak pilih, pada akhirnya ketua juri-lah yang memutuskan hasil akhir.

Seberapa persuasif atau seberapa jauh tim dapat meyakinkan dewan juri diukur dari ketajaman analisis dan gaya yang diperagakan. Keduanya tidak dinilai secara terpisah. Analisis perlu didasarkan pada bukti, hubungan sebab-akibat (baik akibat yang baik atau buruk), nilai, perasaan kolektif, atau dasar lain. Artinya, peserta debat yang memiliki pengetahuan lebih terhadap topik yang diperdebatkan akan mendapat penilaian lebih dari juri (peserta baru mengetahui mosi sesaat sebelum debat dimulai, tidak diperbolehkan bertanya kepada siapapun atau mencari informasi di situs, dan hanya memiliki waktu lima belas menit sebelum debat dimulai). Terlihat jelas bahwa sangat penting bagi tiap peserta debat untuk memahami mosi yang diangkat dalam suatu ronde.

Mosi adalah topik yang diangkat dalam suatu ronde. Mosi dapat dibagi ke dalam beberapa tipe. Dalam artikel ini mosi dibagi ke dalam dua tipe: mosi yang memerlukan model dan yang tidak. Model adalah penjelasan mengenai bagaimana kebijakan yang diusulkan (oleh Perdana Menteri atau Pemimpin Oposisi) akan diimplementasikan. Contoh mosi yang memerlukan model adalah mosi yang diawali dengan *Dewan ini akan ..., Sebagai [X], Dewan ini akan ..., atau Dewan ini percaya bahwa [X] harus/perlu ....* Mosi yang dibahas dalam penelitian ini (*sebagai komunitas Asia, Dewan ini tidak akan mendukung gerakan pro minoritas lainnya seperti Black Lives Matter, gerakan Feminist, gerakan Chicano/Latino*) termasuk dalam tipe mosi yang menghendaki model. Dalam mosi ini tiap tim juga harus mempertimbangkan apa hal-hal yang diketahui, nilai yang dianut, dan kepentingan dari aktor A serta menjelaskan mengapa mosi tersebut sesuai (atau tidak) dengan kepentingan yang dimiliki. Untuk memahami definisi dan model yang diangkat dalam perdebatan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai White Supremacy, Black Lives Matter, Asian Hate, dan Gender Pay Gap.

*White supremacy* menempatkan warga kulit putih sebagai pusat dari rasisme dan ketidaksetaraan. Penyebaran *white supremacy* dapat dilihat pada skala global. Penyebaran *white supremacy* secara sistematis berfungsi sebagai kerangka pikir yang mendasari modernitas, liberalisme, demokrasi, kemajuan, dan rasionalitas (Beliso-De Jesús & Pierre, 2020). Di Amerika serikat ada anggapan bahwa rasisme hanya bersifat pribadi, bukan dalam suatu struktur. Ketidaksetaraan yang timbul akibat perbedaan ras muncul dari anggapan yang dibuat kaum kulit putih dalam lingkungan yang rasis (Pulido, 2015). *White supremacy* erat kaitannya dengan tindakan brutal, dehumanisasi, eksploitasi, dan dominasi suatu ras yang muncul dari *settler colonialism*.

*White supremacy* menonjolkan kekuatan struktur yang dimiliki kaum kulit putih dan dominasi serta eksploitasi yang berujung pada tindakan pengucilan dan pembantaian kaum kulit berwarna lain di kawasan *settler colonialist*. Dengan kata lain, *settler colonialism* muncul dari *white supremacy*. *Settler colonialism* berfokus pada pendudukan permanen suatu wilayah dan kebinasaan penduduk asli dengan tujuan untuk membangun komunitas dengan etnis yang berbeda. Untuk mempertahankan *settler colonialism* dibutuhkan upaya yang berlanjut untuk menghilangkan jejak populasi penduduk pribumi. Pembangunan permukiman baru tersebut mengharuskan pemberantasan penduduk asli, penyitaan dan

privatisasi tanah, dan eksploitasi masyarakat yang terpinggirkan ini dalam sistem kapitalisme yang dibangun lewat rasisme, contohnya di Amerika Serikat, Kanada, Israel, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Argentina, dan Brasil (Bonds & Inwood, 2016). Masyarakat kulit putih yang hidup jauh dari ras lain jarang menjumpai tindakan rasisme dan masih beranggapan rasisme adalah perkara tiap individu. Bahkan masyarakat seperti ini menyalahkan kaum minoritas yang menuduh kaum kulit putih berlaku rasis. Perilaku ini seperti lingkaran yang pada akhirnya menjadi dasar kaum ini semakin memisahkan diri dari kumpulan ras minoritas (Cabrera, 2014). Perkembangan teknologi sosial media turut meningkatkan potensi tindakan rasisme dalam bentuk penyebaran ujaran kebencian dan *cyber-bullying*. Ujaran kebencian adalah serangan yang disengaja, diarahkan pada kelompok tertentu, yang ditujukan pada aspek tertentu yang membentuk identitas kelompok tersebut (Gilbert et al., 2018).

Konsepsi bahwa warga kulit hitam harus rela terus berkorban demi demokrasi tidaklah memadai dan kontraproduktif. Anggapan bahwa warga kulit hitam harus berkorban demi demokrasi menciptakan anggapan yang salah. Penyimpangan dari perilaku taat hukum, penghormatan, dan anti-kekerasan dianggap sebagai bentuk protes yang tidak sah. Pengorbanan sepihak hanya dari warga kulit hitam tidak lagi bisa diterima. Perlu adanya aksi nyata sebagai bentuk protes oleh warga kulit hitam sebagai bagian dari demokrasi. Penolakan terhadap keharusan berkorban dan tingginya desakan terhadap Black Lives Matter berujung pada kritik radikal terhadap negara yang menyamaratakan seluruh warga kulit hitam sebagai kriminal. Kegiatan aksi bisa menjadi suatu bentuk keadilan bagi warga kulit hitam yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan rasa sakit dan membuat penderitaan yang mereka alami dipandang oleh sistem yang menuntut mereka berkorban dengan memendam kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan yang terpaksa mereka terima. Dengan demikian, warga kulit hitam harus secara aktif menolak penahanan massal dan penjarahan komunitas kulit hitam oleh negara dalam bentuk kriminalisasi warga kulit hitam, selain juga mengekspos dan mengutuk tindak kekerasan oleh oknum polisi (Hooker, 2016).

Gerakan sosial dan peningkatan kadar terhadap kecenderungan ini yang berlangsung secara terus-menerus bisa saling menguatkan. Perjuangan sosial dapat mengubah sikap sehingga memungkinkan aktivitas protes lain, yang pada gilirannya akan semakin mengubah sikap suatu kelompok. Gerakan sosial antirasisme dapat berkontribusi pada perubahan di tingkat masyarakat. Gerakan sosial memiliki potensi untuk mempengaruhi sikap implisit dan eksplisit melalui berbagai mekanisme yang asosiatif dan proposisional. Selain itu, gerakan sosial mampu menguatkan identitas kelompok dan mengurangi ketakutan kolektif yang dapat berujung pada rasisme. Secara implisit, sebagian besar terjadi penurunan dukungan terhadap warga kulit putih pada saat kampanye Black Lives Matter berlangsung dibandingkan dengan sebelum kampanye berlangsung. Penurunan dukungan ini berlangsung seiring berlangsungnya kampanye Black Lives Matter, terutama pada beberapa momen puncak. Bahkan, orang kulit putih sendiri secara implisit menjadi kurang mendukung komunitas pro kulit putih selama kampanye Black Lives Matter, meskipun orang kulit hitam hanya menunjukkan sedikit perubahan pada sikap. Secara eksplisit, warga kulit putih juga menjadi kurang mendukung komunitas pro kulit putih, namun orang kulit hitam menjadi kurang pro-Hitam selama kampanye Black Lives Matter. Masing-masing bergerak menuju posisi yang lebih egaliter (Sawyer & Gampa, 2018).

Kelompok pendukung Black Lives Matter menganggap diri mereka sebagai bagian dari gerakan Black Lives Matter yang besar. Sebagian besar hubungan ini terbentuk melalui media sosial. Media sosial memperluas jangkauan dan memperkuat koneksi antaranggota kelompok, Kesempatan untuk membantu aktivis lain mampu mengembangkan identitas kolektif. Media sosial dapat membangun koneksi, memobilisasi peserta dan sumber daya, membangun koalisi, dan potensi pembentukan wacana dan makna kolektif (Mundt, Ross, & Burnett, 2018). Cara media sosial menyebarkan informasi memungkinkan munculnya aksi tandingan atau bahkan risiko bahaya fisik bagi para aktivis, selain adanya kontrol dan pengawasan dari negara.

Tagar “#AllLivesMatter” dan “#BlackLivesMatter” adalah dua tanda yang diperebutkan yang mewakili dua ideologi dominan. Media sosial berfungsi sebagai ruang publik tempat kaum muda untuk membentuk wacana publik untuk mengekspresikan pengalaman dan sudut pandang mereka (Carney, 2016). Beberapa pengguna Twitter mendukung *white supremacy* dengan menyebarkan ideologi yang dianggap mewakili seluruh ras lewat tagar “#AllLivesMatter”. Dialog kemudian bergeser dari perdebatan mengenai perbedaan makna kedua tanda ini (#BlackLivesMatter dan #AllLivesMatter) menjadi bagaimana kedua tanda ini dapat disandingkan.

Protes besar-besaran dapat memaksa sistem yang paling represif sekalipun untuk berkompromi. Sikap patuh tidak akan mengubah stigma masyarakat umum terhadap kaum kulit hitam. Warga kulit hitam menuntut pengakuan identitas dan hak asasi manusia, bukan sekadar inklusi di masyarakat. Mereka menolak berkolaborasi dengan penguasa dan menganggap kapitalisme (bukan hanya *white supremacy*) sebagai lawan. Mereka menghendaki penataan ulang hubungan kekuasaan, bukan sekadar berkurangnya arogansi oknum polisi. Hanya sedikit dari aktivis Black Lives Matter yang merupakan pengurus tetap. Mereka menyadari kelemahan yang ada jika bergantung pada politisi, pengadilan, dan otoritas lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, aktivis Black Lives Matter juga tidak melibatkan serikat pekerja dan buruh sebagai sekutu. Perlu penguatan hubungan dengan kelompok-kelompok lain, terutama yang secara eksplisit membela hak kaum transgender dari ras lain karena hingga kini tidak ada aliansi nasional dari berbagai ras yang bersatu dalam masalah kekerasan polisi (Rickford, 2016).

Warga Amerika keturunan Asia melaporkan mengalami bentuk rasisme berikut di perguruan tinggi: (a) pelecehan rasial, (b) rasisme kelompok, (c) isolasi rasial, (d) tekanan untuk memisahkan diri berdasarkan ras, (e) tekanan untuk berasimilasi dengan ras lain, (f) pembungkaman ras, (g) mitos mengenai orang asing, (h) mitos mengenai minoritas yang ideal, dan (i) mitos mengenai sifat inferior minoritas (Museus & Park, 2015). Ujaran kebencian yang ditujukan pada suatu etnis layak mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada bentuk hinaan lainnya (Boeckmann & Liew, 2002). Mahasiswa Amerika Serikat keturunan Asia memandang bahwa penghinaan yang ditujukan pada kelompoknya menimbulkan dampak yang berbeda dibandingkan dengan penghinaan yang ditujukan pada seorang individu. Ujaran kebencian juga menghasilkan respons emosional yang lebih ekstrem. Dalam kasus warga Amerika Serikat keturunan Asia, pengaruh yang ditimbulkan berdampak pada nilai kolektif yang mereka anut.

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan risiko warga Amerika Serikat keturunan Asia terhadap ujaran kebencian dan vandalisme. Selama pandemi COVID-19, pandangan negatif dan serangan terhadap warga Amerika Serikat keturunan Asia juga meningkat (Tessler, Choi, & Kao, 2020). COVID-19 terkait langsung dengan Tiongkok, tidak hanya dalam hal asal-usul penyakit, tetapi juga dalam cakupannya. Relatif mudah bagi seseorang untuk memperlakukan warga Tiongkok atau warga Amerika Serikat keturunan Asia lainnya sebagai perwujudan fisik dari penyakit dan orang asing. Warga Amerika Serikat keturunan Asia telah mengalami kekerasan verbal dan fisik yang dilatarbelakangi rasisme dan xenofobia sejak kedatangan mereka di Amerika pada akhir tahun 1700-an hingga saat ini. Negara sendiri secara implisit sering memperkuat, mendorong, dan melanggengkan bentuk kekerasan ini melalui retorika fanatik dan kebijakan eksklusif (Gover, Harper, & Langton, 2020).

Croucher dkk. (2020) mengidentifikasi lima hubungan antara prasangka/kebencian terhadap warga Amerika keturunan Asia, khususnya warga Tiongkok, dan penggunaan media sosial. Pertama, semakin banyak pengguna media sosial percaya bahwa media sosial yang mereka gunakan adil, akurat, menyajikan fakta, dan peduli dengan publik, semakin besar kemungkinan pengguna percaya bahwa warga Tiongkok menimbulkan ancaman, baik secara simbolis maupun nyata. Kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan yang signifikan terhadap jenis prasangka yang diderita. Laki-laki lebih sering mengalami kecemasan yang timbul antarkelompok dan wanita lebih sering mengalami ancaman, baik secara simbolis maupun nyata. Ketiga, responden yang tidak setiap hari menggunakan

media sosial mempunyai kemungkinan lebih kecil daripada yang menggunakan Facebook untuk memiliki anggapan bahwa warga Tiongkok merupakan ancaman secara simbolis. Keyakinan pengguna terhadap media sosial yang digunakan atau aktivitas berbagi pendapat tidak berkaitan dengan kecemasan antarkelompok. Responden yang mengaku sebagai pendukung partai Demokrat di Amerika Serikat menyatakan merasakan tingkat ancaman simbolis yang lebih tinggi dari warga Amerika keturunan Tiongkok.

Dari pembahasan dalam paragraf-paragraf sebelumnya, diskriminasi juga dapat dilatarbelakangi gender. Terdapat dua pendekatan yang menjelaskan alasan mengenai adanya kesenjangan upah, yaitu teori *same-gender referent* and teori *reward expectations*. Teori *same-gender referent* menyatakan bahwa karyawan perempuan membandingkan pendapatan mereka yang mereka anggap rendah terutama dengan karyawan perempuan lain yang dibayar rendah. Menurut teori *reward expectations*, baik pria maupun wanita menganggap gender sebagai variabel yang memunculkan anggapan mengenai seberapa banyak seharusnya upah yang diterima karyawan laki-laki dibanding karyawan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Hasil penelitian Auspurg et al. (2017) mendukung teori *reward expectations*. Perbedaan gaji antara karyawan laki-laki dan perempuan kemungkinan akan tetap ada di masyarakat Barat karena baik laki-laki maupun perempuan menganggap pendapatan yang agak lebih rendah untuk karyawan perempuan daripada karyawan pria sebagai keadilan. Diskriminasi gender kemungkinan akan tetap ada meskipun ada kebutuhan dan kebijakan karena masih ada dukungan dari perempuan, yang sebenarnya dirugikan.

Bennedsen dkk. (2018) meneliti dampak perubahan undang-undang di Denmark yang mengharuskan perusahaan di sana untuk memberikan data statistik upah yang diterima pegawai laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut mengurangi kesenjangan gaji antara karyawan laki-laki dan perempuan. Pertama, karyawan laki-laki mengalami pertumbuhan upah yang lebih lambat dibandingkan dengan karyawan perempuan. Kedua, perusahaan yang tunduk pada peraturan lebih cenderung mempekerjakan dan mempromosikan lebih banyak karyawan perempuan. Ketiga, dampak negatif muncul pada produktivitas perusahaan, tetapi tidak ada efek signifikan pada laba perusahaan.

Mandel dan Semyonov (2014) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan kesenjangan jumlah pendapatan antara laki-laki dengan perempuan di sektor publik dan swasta. Faktor yang menyebabkan semakin setaranya jumlah pendapatan laki-laki dibanding perempuan di sektor publik dan swasta antara lain perbedaan komposisi gender dalam sumber daya manusia, pasokan tenaga kerja, faktor sosiodemografis, segregasi pekerjaan, dan bagian lain yang belum dapat dijelaskan. Penurunan yang signifikan dalam diskriminasi pendapatan perempuan ini berkaitan dengan faktor lain yang belum dapat dijelaskan. Berbeda dengan pengaruh diskriminasi, pengaruh sumber daya manusia dan kemampuan seseorang pada kesenjangan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan relatif kecil, baik di sektor negeri maupun swasta. Jam kerja merupakan faktor terpenting terkait ketidaksetaraan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan di sektor negeri dan swasta, meskipun masih jauh lebih dominan di sektor swasta. Pemisahan antara karyawan laki-laki dan perempuan yang mulai jarang ditemui mempengaruhi penurunan kesenjangan gaji di sektor swasta. Sebaliknya, di sektor publik, Pemisahan antara karyawan laki-laki dan perempuan masih menjadi penyebab utama kesenjangan gaji.

Berbeda dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, kesenjangan perbedaan gaji antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan di Tiongkok justru meningkat dalam dua dekade terakhir. Hal ini diperparah dengan jumlah karyawan perempuan dengan upah rendah yang tidak lagi bekerja. Sejak tahun 1980-an jumlah perempuan yang bekerja menurun dan kesenjangan antara jumlah karyawan laki-laki dan perempuan meningkat (Chi & Li, 2014).

Schippers dkk. (2015) mengkaji efek dari intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan konseptualisasi dan tindakan berorientasi tujuan pada mahasiswa di Eropa, dengan perhatian khusus pada gender dan etnis. Intervensi tersebut meningkatkan prestasi akademik dan tingkat

retensi, terutama untuk etnis laki-laki minoritas. Kesenjangan dalam kemampuan laki-laki dan perempuan, dan antara etnis minoritas dengan mayoritas, menjadi jauh lebih kecil dalam kelompok intervensi. Semua kelompok intervensi teridentifikasi jauh lebih baik daripada kelompok kontrol, tetapi efek paling besar dialami laki-laki etnis minoritas dan peningkatan performa terbesar dijumpai pada laki-laki etnis minoritas. Intervensi yang diterapkan di tahun awal mahasiswa dapat mengurangi kesenjangan gender dan yang dialami etnis minoritas dalam mencapai prestasi yang substansial secara signifikan.

Babak perempat final KDMI 2021 mengangkat mosi *sebagai komunitas Asia, Dewan ini tidak akan mendukung gerakan pro minoritas lainnya seperti Black Lives Matter, gerakan feminis, gerakan Chicano/Latino*. Seperti telah disebutkan pada paragraf sebelumnya mengenai ketajaman analisis dan pentingnya peserta memiliki pengetahuan yang relevan dengan mosi (misal dalam bentuk fakta empiris, asumsi yang melatarbelakangi, atau teori yang menghubungkan data yang dimiliki dengan fakta), pengetahuan mengenai *white supremacy, Black Lives Matter, Asian hate, dan gender pay gap* penting untuk dimiliki peserta dalam mosi ini. Pengetahuan yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai empat topik ini akan memberikan kontribusi dalam membahas kasus kali ini, yang belum pernah diangkat dengan detail sebelumnya.

Di sisi lain, seperti juga telah disebutkan sebelumnya, juri harus bertindak layaknya *warga yang sadar akan hak pilihnya*. Beberapa masalah muncul dari sini. Pertama, perspektif ini tidak serta-merta menghilangkan subjektivitas juri. Kedua, dalam konteks kompetisi debat, pihak yang melakukan evaluasi seharusnya adalah orang yang lebih paham daripada pihak yang dinilai.

Untuk menjawab kedua masalah tersebut, tulisan ini bertujuan, pertama, menganalisis debat yang berlangsung pada babak perempat final di dua ruang yang berbeda. Selanjutnya, keduanya akan dibandingkan dengan temuan dalam artikel pada penelitian sebelumnya mengenai *white supremacy, Black Lives Matter, Asian hate, dan gender pay gap*, yang sudah dibahas sebelumnya. Tulisan ini tidak bertujuan memberikan solusi terhadap bagaimana seharusnya format debat Parlemen Inggris diselenggarakan.

## Metode

Untuk mencapai tujuan, penelitian kualitatif ini akan mengandalkan studi pustaka dalam menjelaskan kasus yang dikaji. Data berupa transkrip rekaman debat babak perempat final KDMI 2021 di ruang B1 (Universitas Negeri Jakarta, Universitas Udayana, Universitas Tanjungpura, dan Universitas Gadjah Mada) dan C1 (Universitas Pertamina, Universitas Syiah Kuala, Universitas Airlangga, Universitas Hasanuddin) dari kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Debat berlangsung secara paralel sehingga selain perbedaan tim yang berlaga, terdapat pula perbedaan komposisi dewan juri di masing-masing ruang. Transkrip dianalisis berdasarkan model argumen menurut Toulmin dkk. (1984).

## Hasil dan pembahasan

Tabel 1 merangkum argumen utama yang diketengahkan pada paruh awal debat di ruang B1.

Tabel 1. Argumen Paruh Awal Debat Ruang B1

Pemerintah	Oposisi
Etnis Asia tidak seliberal Eropa atau Amerika. Beberapa nilai seperti homoseksual tidak sesuai dengan kultur Asia.	Ketidaksesuaian dengan kultur lain bukan merupakan alasan yang tepat untuk tidak memberi dukungan terhadap para minoritas. Tindakan diam merupakan suatu bentuk dukungan terhadap penindasan.

Etnis Asia kurang edukasi mengenai isu di luar komunitas mereka. Dukungan diberikan karena mengikuti tren.	Semakin banyak dukungan, semakin tinggi suatu tren, yang akan semakin menambah jumlah dukungan. Semakin tinggi tren, semakin luas cakupan dan semakin besar kemungkinan terjadi perubahan dari tambahan dukungan dari pihak yang berempati.
Edukasi anti-rasisme oleh pemerintah merupakan langkah yang lebih efektif. Rasisme merupakan masalah yang terjadi secara struktural dan terlalu berat bagi gerakan pro minoritas.	Komunitas etnis Asia merupakan suatu komunitas jumlah anggota yang besar. Komunitas ini juga solid, seperti komunitas etnis Tiongkok.
Dukungan dari komunitas lain bisa disalahartikan. Tiap komunitas mempunyai ideologi masing-masing yang bisa jadi tidak sesuai.	Terdapat nilai-nilai universal yang berlaku lintas komunitas Kesalahpahaman bisa diperbaiki. Dukungan warga mayoritas terhadap minoritas tidak bisa diharapkan.
Keterlibatan di sosial media memberi ilusi seseorang telah berkontribusi. Bisa jadi tidak ada kontribusi nyata yang dilakukan.	Untuk mengatasi rasisme, diperlukan dukungan lintas negara. Kemampuan media sosial untuk menyebarkan tren sangat signifikan dalam menggugah kesadaran banyak orang.

Debat pada paruh awal berkisar pada perbedaan kultur, media sosial sebagai tren, ketidakmampuan pro-minoritas memberi perubahan yang signifikan, perbedaan ideologi, *slacktivism*. Tabel 2 merangkum argumen utama yang diketengahkan pada paruh akhir debat di ruang B1.

Tabel 2. Argumen Paruh Akhir Debat Ruang B1

Pemerintah	Oposisi
Etnis Asia sendiri mengalami diskriminasi. Upaya pemberian dukungan ke kelompok lain akan makin menghilangkan eksistensi.	Perlu upaya untuk menggabungkan kelompok pro minoritas. Hal ini perlu untuk menghindari persaingan antar-kelompok minoritas.
Suatu kebijakan akan menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Kebijakan yang menguntungkan kelompok minoritas tertentu tidak selalu sejalan dengan komunitas Asia.	Tren isu minoritas dapat membuahkan suatu kebijakan yang menguntungkan beberapa kelompok minoritas sekaligus. Contohnya tampak dari <i>police reform</i> dan usaha mengurangi <i>gender pay gap</i> .

Debat pada paruh akhir berkisar pada dampak pemberian dukungan ke kelompok pro minoritas lain terhadap eksistensi komunitas Asia dan pihak yang diuntungkan bila terjadi perubahan kebijakan. Tabel 3 merangkum argumen utama yang diketengahkan pada paruh awal di ruang C1.

Tabel 3. Argumen Paruh Awal Debat Ruang C1

Pemerintah	Oposisi
Dukungan etnis Asia terhadap komunitas lain akan semakin mempertajam rasisme. Pihak mayoritas akan semakin terprovokasi untuk melakukan penindasan.	Etnis Asia menerima perlakuan rasisme yang lebih kejam dan lebih memerlukan dukungan. Aktivist Black Lives Matter lebih peduli pada komunitas kulit hitam.
Banyak pendukung hanya mengikuti tren. Dukungan tidak berguna ketika tren berlalu. Bahkan dengan besarnya jumlah etnis Asia dukungan yang diberikan tidak berarti.	Eksistensi suatu gerakan perlu dikenali sebanyak mungkin orang. Semakin besar eksistensi, akan semakin besar dukungan. Komunitas-komunitas dapat saling mendukung.



Dibutuhkan edukasi dan rehabilitasi untuk menanggulangi rasisme. Hanya pemerintah yang mempunyai sumber daya yang cukup, sedangkan kelompok pro-minoritas tidak

Diskriminasi datang dari pemerintah yang didukung mayoritas. Black Lives Matter muncul sebagai lawan dari *white supremacy*.

Debat pada paruh awal berkisar pada perlunya etnis lain memberi dukungan terhadap suatu gerakan pro minoritas, tren dan jumlah pendukung, dan peran pemerintah. Tabel 4 merangkum argumen utama yang diketengahkan pada paruh akhir akhir di ruang C1.

Tabel 4. Argumen Paruh Akhir Debat Ruang C1

Pemerintah	Oposisi
Tiap komunitas akan fokus ke agenda masing-masing. Tiap komunitas memiliki sejarah masing-masing yang melatarbelakangi.	Pandangan bahwa tiap etnis mempunyai kepentingan masing-masing merupakan pandangan yang rasis. Sikap pembiaran dapat disalahartikan sebagai bentuk dukungan terhadap penindasan.
Sumber daya perlu difokuskan untuk menyelesaikan masalah yang dialami komunitas Asia, bukan komunitas lain. Komunitas Asia sendiri menderita banyak diskriminasi.	Masalah yang dialami suatu komunitas bisa jadi turut dirasakan komunitas lain. Dukungan kepada komunitas akan meningkatkan eksistensi dan berbuah solidaritas yang dapat menjadi sumber daya tambahan.

Debat pada paruh akhir berkisar pada kepentingan masing-masing gerakan pro minoritas dan alokasi sumber daya. Dari klaim yang muncul terdapat tiga yang memiliki kemiripan di kedua ruang. Klaim mengenai media sosial sebagai tren di ruang B1 paruh awal mirip dengan klaim mengenai tren dan jumlah pendukung di ruang C1 paruh awal. Klaim mengenai ketidakmampuan pro-minoritas memberi perubahan yang signifikan di ruang B1 paruh awal mirip dengan klaim mengenai peran pemerintah di ruang C1 paruh awal. Klaim mengenai dampak pemberian dukungan ke kelompok pro minoritas lain terhadap eksistensi komunitas Asia di ruang B1 paruh akhir mirip dengan klaim mengenai alokasi sumber daya di ruang C1 paruh akhir.

Subjektivitas juri akan tetap muncul dalam penilaian. Seluruh tim diperbolehkan membawakan konsep yang mereka kuasai ke dalam debat namun mereka dituntut untuk menjelaskannya kepada juri tanpa menggunakan jargon-jargon. Meskipun diasumsikan hanya memiliki pengetahuan umum, juri dituntut untuk mampu mengikuti dan menganalisis perdebatan secara logis dan memahami konsep yang kompleks ketika dijelaskan oleh peserta debat. Bisa jadi seorang juri harus “berpura-pura” tidak mengetahui konsep yang disampaikan peserta debat. Namun, Bisa juga seorang juri benar-benar tidak memahami penjelasan suatu konsep, baik akibat tingginya tingkat kerumitan atau cara penyampaian yang kurang jelas. Tiap orang mempunyai pengetahuan dengan kadar yang berbeda yang berlandaskan asumsi masing-masing. Ini juga berarti juri bisa mempunyai perbedaan interpretasi terhadap suatu kasus yang disampaikan peserta debat. Mustahil menentukan apa saja pengetahuan, konsep, asumsi, dan hal lain yang harus dan yang tidak dimiliki di suatu mosi oleh *warga yang sadar akan hak pilihnya*.

Secara ekstrem ini berarti penilaian suatu juri tidak bisa disalahkan, baik oleh juri lain maupun peserta debat. Namun, pandangan ini bertentangan dengan tujuan kompetisi ini sebagai bentuk evaluasi kemampuan mahasiswa. Terdapat perbedaan tujuan dalam kompetisi debat (pendidikan) dengan parlemen (pengambilan kebijakan). Dalam suatu kompetisi, tidak ada artinya jika ada beberapa versi penilaian dan seluruhnya benar; bahkan tiap peserta debat pun akan berpendapat bahwa timnya lah yang paling benar. Salah satu respon terhadap hal ini adalah adanya evaluasi kelayakan juri oleh Ketua Dewan Juri atau Juri Inti. Namun, pemaksaan suatu interpretasi kepada orang lain, dalam hal ini dari

Ketua Dewan Juri ke juri-juri lain kemudian ke peserta debat, berlawanan dengan tujuan kompetisi debat dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis.

### Simpulan

Jika subjektivitas akan selalu ada dan masing-masing dewan juri memiliki pengetahuan yang berbeda-beda terhadap suatu mosi, apakah format Parlemen Inggris sebaiknya tidak digunakan atau kompetisi debat sebaiknya tidak dilaksanakan? Keputusan ini di luar lingkup penelitian ini. Studi kasus ini menunjukkan permasalahan yang timbul akibat model juri sebagai *warga yang sadar akan hak pilihnya* atau *ordinary intelligent voter*.

### Referensi

- Auspurg, K., Hinz, T., & Sauer, C. (2017). Why should women get less? Evidence on the gender pay gap from multifactorial survey experiments. *American Sociological Review*, 82(1), 179-210.
- Bennedsen, M., Simintzi, E., Tsoutsoura, M., & Wolfenzon, D. (2018). Do firms respond to gender pay gap transparency?. *The Journal of Finance*.
- Boeckmann, R. J., & Liew, J. (2002). Hate speech: Asian American students' justice judgments and psychological responses. *Journal of Social Issues*, 58(2), 363-381.
- Bonds, A., & Inwood, J. (2016). Beyond white privilege: Geographies of white supremacy and settler colonialism. *Progress in Human Geography*, 40(6), 715-733.
- Cabrera, N. L. (2014). Exposing whiteness in higher education: White male college students minimizing racism, claiming victimization, and recreating white supremacy. *Race Ethnicity and Education*, 17(1), 30-55.
- Carney, N. (2016). All lives matter, but so does race: Black lives matter and the evolving role of social media. *Humanity & Society*, 40(2), 180-199.
- Chi, W., & Li, B. (2014). Trends in China's gender employment and pay gap: Estimating gender pay gaps with employment selection. *Journal of Comparative Economics*, 42(3), 708-725.
- Croucher, S. M., Nguyen, T., & Rahmani, D. (2020). Prejudice toward Asian Americans in the COVID-19 pandemic: The effects of social media use in the United States. *Frontiers in Communication*, 5, 39.
- De Gibert, O., Perez, N., García-Pablos, A., & Cuadros, M. (2018). Hate speech dataset from a white supremacy forum. *arXiv preprint arXiv:1809.04444*.
- Gover, A. R., Harper, S. B., & Langton, L. (2020). Anti-Asian hate crime during the COVID-19 pandemic: Exploring the reproduction of inequality. *American journal of criminal justice*, 45(4), 647-667.
- Hooker, J. (2016). Black Lives Matter and the paradoxes of US Black politics: From democratic sacrifice to democratic repair. *Political Theory*, 44(4), 448-469.
- M. Beliso-De Jesús, A., & Pierre, J. (2020). Anthropology of white supremacy. *American anthropologist*, 122(1), 65-75.
- Mandel, H., & Semyonov, M. (2014). Gender pay gap and employment sector: Sources of earnings disparities in the United States, 1970–2010. *Demography*, 51(5), 1597-1618.
- Mundt, M., Ross, K., & Burnett, C. M. (2018). Scaling social movements through social media: The case of Black Lives Matter. *Social Media+ Society*, 4(4), 2056305118807911.
- Museus, S. D., & Park, J. J. (2015). The continuing significance of racism in the lives of Asian American college students. *Journal of College Student Development*, 56(6), 551-569.
- Pulido, L. (2015). Geographies of race and ethnicity 1: White supremacy vs white privilege in environmental racism research. *Progress in human geography*, 39(6), 809-817.
- Rickford, R. (2016, January). Black lives matter: Toward a modern practice of mass struggle. In *New Labor Forum* (Vol. 25, No. 1, pp. 34-42). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications.
- Sawyer, J., & Gampa, A. (2018). Implicit and explicit racial attitudes changed during Black Lives Matter. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 44(7), 1039-1059.
-

- Schippers, M. C., Scheepers, A. W., & Peterson, J. B. (2015). A scalable goal-setting intervention closes both the gender and ethnic minority achievement gap. *Palgrave Communications*, 1(1), 1-12.
- Tessler, H., Choi, M., & Kao, G. (2020). The anxiety of being Asian American: Hate crimes and negative biases during the COVID-19 pandemic. *American Journal of Criminal Justice*, 45(4), 636-646.
- Toulmin, S., Rieke, R. D., & Janik, A. (1984). *An Introduction to Reasoning (Second Edition)*. New York: Macmillan Publishing Company.
- World Universities Debating Council. (n.d.). Retrieved July 5, 2022, from World Universities Debating Council website: <https://www.worlddebating.org/debate-guides>.